

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

## **KOORDINASI BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM KEBIJAKAN PENATAAN RUANG AEROTROPOLIS DI KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA**

Jemz Andre Ratu Edo<sup>1</sup>

Agus Subagyo<sup>2</sup>

Danny Permana<sup>3</sup>

*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

### **Abstract**

*This study aims to analyze the coordination carried out by the Regional Planning and Development Agency (Bappelitbangda) in the spatial planning policy of the Aerotropolis area in Kertajati District, Majalengka Regency. The development of the West Java International Airport (BIJB) Kertajati has driven a massive transformation of the regional spatial structure, requiring cross-sectoral coordination between the government, private sector, and community stakeholders. Using Hasibuan's coordination theory, which includes the dimensions of unity of action, communication, division of labor, and discipline, this study applies a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and document analysis. The results indicate that Bappelitbangda plays a crucial coordinating role in ensuring policy alignment between provincial and regency-level development plans. However, various obstacles persist, such as overlapping authority, weak vertical and horizontal coordination, and limited understanding among local stakeholders regarding the Aerotropolis concept. The study concludes that effective coordination demands institutional integration, consistent communication, and a shared understanding of spatial development priorities to support sustainable regional growth around BIJB Kertajati.*

**Keywords:** *Coordination, Regional Planning, Aerotropolis, Spatial Policy, Kertajati*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka merupakan salah satu proyek strategis nasional yang memiliki implikasi besar terhadap perubahan tata ruang wilayah di Jawa Barat bagian timur. Kehadiran bandara tersebut diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mengintegrasikan sektor transportasi udara, industri logistik, dan kawasan permukiman

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

modern yang dikenal sebagai Kertajati Aerocity atau Aerotropolis. Namun, transformasi spasial ini menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan penataan ruang, terutama dalam aspek koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah.

Kecamatan Kertajati yang sebelumnya merupakan kawasan pertanian kini berubah menjadi wilayah dengan dinamika pembangunan yang tinggi. Proses alih fungsi lahan dan perubahan pola pemanfaatan ruang terjadi secara cepat, melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga pihak swasta. Dalam konteks ini, koordinasi antarlembaga menjadi faktor krusial agar kebijakan penataan ruang dapat dilaksanakan secara efektif tanpa menimbulkan konflik tata guna lahan dan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya koordinasi antarinstansi pemerintah dalam mengintegrasikan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan penataan ruang Aerotropolis. Bappelitbangda Kabupaten Majalengka sebagai lembaga perencana utama daerah berperan penting dalam menyinergikan kepentingan lintas sektor. Namun dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara instansi provinsi, kabupaten, dan lembaga pengelola proyek BIJB yang menghambat konsistensi pelaksanaan kebijakan ruang.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan utama: bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dalam kebijakan penataan ruang Aerotropolis di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas koordinasi yang dilakukan oleh Bappelitbangda serta mengidentifikasi kendala dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam proses koordinasi kebijakan ruang.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

Penelitian ini penting karena hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi koordinasi pemerintahan daerah dan praktik tata kelola pembangunan berbasis ruang. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi lintas sektor, terutama dalam pengelolaan kawasan strategis yang berorientasi internasional seperti Aerotropolis Kertajati.

### *Kerangka Teori*

Dalam ilmu administrasi publik, koordinasi didefinisikan sebagai upaya untuk mengintegrasikan kegiatan dari berbagai unit organisasi agar tercapai kesatuan tindakan menuju tujuan bersama (Hasibuan, 2019). Koordinasi bukan sekadar proses teknis, melainkan mekanisme manajerial yang menuntut komunikasi efektif, pembagian tugas yang proporsional, dan disiplin organisasi. Menurut Hasibuan, koordinasi terdiri atas empat dimensi utama: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin.

Dimensi kesatuan tindakan menunjukkan pentingnya setiap bagian organisasi bergerak ke arah yang sama tanpa terjadi duplikasi kerja. Dalam konteks pemerintahan daerah, kesatuan tindakan mencerminkan harmonisasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah. Dimensi komunikasi menekankan perlunya saluran informasi yang terbuka dan efektif agar setiap pihak memahami peran serta tanggung jawabnya. Dimensi pembagian kerja menuntut kejelasan fungsi antarorganisasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Sementara itu, disiplin menjadi fondasi dalam menjaga konsistensi dan ketepatan waktu pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks kebijakan penataan ruang Aerotropolis, teori koordinasi Hasibuan relevan karena pembangunan kawasan strategis ini melibatkan berbagai aktor lintas sektor dan tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada perencanaan teknis, tetapi juga pada efektivitas koordinasi yang dilakukan oleh Bappelitbangda sebagai koordinator pembangunan daerah. Dengan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

demikian, teori ini menjadi kerangka analisis yang tepat untuk menilai sejauh mana koordinasi telah berjalan dalam kebijakan penataan ruang di Kertajati.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena koordinasi secara empiris dan mendalam. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dengan fokus pada Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perhubungan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan utama terdiri dari pejabat Bappelitbangda, Kepala Seksi Tata Ruang Dinas PUPR, perwakilan BIJB, dan tokoh masyarakat di sekitar Kertajati.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini berupaya menemukan pola koordinasi serta hambatan yang muncul di lapangan berdasarkan teori koordinasi Hasibuan.

## **PEMBAHASAN**

Kecamatan Kertajati di Kabupaten Majalengka merupakan kawasan strategis yang mengalami transformasi besar-besaran setelah ditetapkannya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Sejak diresmikan pada tahun 2018, kawasan ini menjadi simpul ekonomi baru di bagian timur Jawa Barat dengan visi menjadi pusat pertumbuhan kawasan metropolitan berbasis Aerotropolis. Proyek ini tidak hanya berdampak pada sektor transportasi udara, tetapi juga menimbulkan konsekuensi besar terhadap tata ruang, sosial, dan ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Majalengka, melalui Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), dituntut mampu mengoordinasikan berbagai kepentingan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

lintas sektor dan wilayah untuk menjaga agar pembangunan tetap berada dalam koridor rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR).

Data dari Bappelitbangda tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total luas Kecamatan Kertajati sekitar 6.600 hektare, hampir 40 persen kini telah dialokasikan untuk pengembangan industri, logistik, dan kawasan komersial pendukung bandara. Perubahan fungsi lahan yang cepat sering kali tidak diimbangi oleh kesiapan regulasi dan kelembagaan daerah. Hal inilah yang menjadi latar empiris penelitian ini, di mana koordinasi antarinstansi pemerintah dan antartingkat pemerintahan menjadi krusial untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, konflik kepentingan, serta degradasi lingkungan. Dengan demikian, Bappelitbangda memiliki peran kunci sebagai “dirigen pembangunan” yang bertugas menyatukan arah, komunikasi, dan pelaksanaan kebijakan penataan ruang Aerotropolis di Kertajati.

#### 1) Dimensi Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan dalam teori Hasibuan (2019) menekankan pentingnya harmonisasi dan sinergi antarunit organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks penataan ruang Aerotropolis, kesatuan tindakan menjadi tantangan mendasar karena keterlibatan multiaktor yang terdiri dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, serta pihak swasta seperti PT BIJB dan pengembang kawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Bappelitbangda, salah satu kendala utama adalah tidak sinkronnya arah kebijakan antara RTRW Provinsi Jawa Barat dengan RTRW Kabupaten Majalengka. Provinsi lebih menekankan konektivitas antarwilayah dan investasi industri, sementara pemerintah kabupaten berorientasi pada pengendalian pemanfaatan ruang serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Ketiadaan kesamaan persepsi ini memunculkan ketidaksepahaman dalam perencanaan proyek prioritas. Misalnya, pembangunan jalan penghubung antara BIJB dan Tol Cisumdawu sempat terkendala karena terjadi perbedaan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

kewenangan antara provinsi dan kabupaten dalam hal pembebasan lahan. Bappelitbangda berupaya melakukan koordinasi melalui forum perencanaan terpadu (*joint planning forum*) bersama Bappeda Provinsi Jawa Barat, namun hasilnya belum maksimal karena keputusan akhir sering kali ditentukan oleh pihak provinsi. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesatuan tindakan masih berada pada tahap awal pembentukan dan sangat bergantung pada kehendak politik lintas level pemerintahan.

Meski demikian, terdapat perkembangan positif dalam dua tahun terakhir. Bappelitbangda mulai melibatkan perguruan tinggi lokal dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses konsultasi publik revisi RTRW. Partisipasi multiaktor ini dinilai sebagai langkah penting untuk membangun kesepahaman mengenai visi pembangunan Aerotropolis. Upaya ini sejalan dengan konsep *integrated planning* yang menekankan kolaborasi antarsektor untuk mencapai satu arah kebijakan ruang yang berkelanjutan. Dalam konteks teori Hasibuan, langkah ini menunjukkan usaha konkret untuk membentuk kesatuan tindakan melalui pendekatan partisipatif dan konsultatif.

Namun demikian, kesatuan tindakan belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat ego sektoral yang kuat. Beberapa dinas cenderung mempertahankan otonomi program masing-masing tanpa menyesuaikan dengan agenda pembangunan lintas sektor. Dengan demikian, kesatuan tindakan di Kabupaten Majalengka masih memerlukan penguatan kelembagaan dan konsolidasi regulasi agar arah pembangunan Aerotropolis benar-benar selaras dengan kebijakan penataan ruang nasional dan daerah.

## 2) Dimensi Komunikasi

Komunikasi merupakan dimensi kedua yang menjadi inti dari efektivitas koordinasi. Dalam implementasi kebijakan penataan ruang Aerotropolis, komunikasi berperan penting sebagai sarana penyampaian informasi, negosiasi

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

kepentingan, serta penyamaan persepsi antaraktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappelitbangda telah membentuk mekanisme komunikasi formal melalui rapat koordinasi lintas instansi dan *focus group discussion* (FGD) tematik tentang tata ruang. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas PUPR, komunikasi antarinstansi sering bersifat administratif dan kurang berorientasi pada pemecahan masalah substantif di lapangan.

Misalnya, informasi mengenai perubahan zonasi atau alih fungsi lahan sering kali tidak sampai ke tingkat pelaksana teknis di kecamatan dan desa. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan di lapangan tidak sinkron dengan rencana makro. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan mengetahui perubahan peruntukan lahan setelah proyek konstruksi dimulai. Minimnya sosialisasi kepada warga menunjukkan bahwa komunikasi vertikal antara pemerintah dan masyarakat belum berjalan efektif. Ini memperkuat temuan lapangan bahwa koordinasi belum sepenuhnya terbuka dan partisipatif.

Di sisi lain, komunikasi horizontal antar dinas juga menghadapi kendala teknologi dan ego birokrasi. Masing-masing instansi memiliki sistem data sendiri tanpa integrasi spasial bersama. Akibatnya, data yang digunakan dalam perencanaan sering kali berbeda antara Bappelitbangda, Dinas PUPR, dan Dinas Perhubungan. Sebagai respons terhadap permasalahan ini, Bappelitbangda menginisiasi pembangunan *Sistem Informasi Tata Ruang Majalengka* (SITARMA) berbasis GIS. Sistem ini diharapkan menjadi platform komunikasi data spasial antarinstansi secara real-time.

Secara teoritis, Hasibuan (2019) menegaskan bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya bergantung pada media formal, tetapi juga pada kejelasan pesan dan kesediaan pihak-pihak untuk mendengarkan satu sama lain. Dalam konteks ini, komunikasi antarinstansi di Majalengka masih didominasi pola top-down sehingga belum mencerminkan prinsip komunikasi dua arah yang sejati.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Oleh karena itu, penguatan komunikasi kolaboratif yang melibatkan unsur masyarakat sipil perlu ditingkatkan untuk memperkuat legitimasi kebijakan penataan ruang Aerotropolis.

### 3) Dimensi Pembagian Kerja

Pembagian kerja yang jelas merupakan pilar ketiga dari koordinasi yang efektif. Menurut Hasibuan (2019), pembagian kerja menciptakan efisiensi karena setiap unit organisasi mengetahui batas kewenangan dan tanggung jawabnya. Dalam konteks Bappelitbangda Majalengka, pembagian peran antara instansi daerah dan provinsi telah dituangkan dalam dokumen *Rencana Tata Ruang Wilayah Terpadu BIJB-Kertajati (2020–2040)*. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan tumpang tindih tanggung jawab antarinstansi. Dinas PUPR misalnya, memiliki kewenangan dalam pengawasan pemanfaatan ruang, sementara Bappelitbangda bertanggung jawab atas perencanaan makro. Akibatnya, dalam praktik di lapangan sering muncul dualisme kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bappelitbangda, sebagian besar kegiatan pembangunan infrastruktur pendukung Aerotropolis seperti kawasan pergudangan dan jalan arteri dilakukan oleh pihak provinsi melalui kontraktor pihak ketiga tanpa melibatkan pengawasan langsung dari kabupaten. Hal ini menimbulkan masalah koordinasi teknis, terutama terkait kesesuaian proyek dengan RDTR kabupaten. Dalam beberapa kasus, proyek berjalan meski belum mengantongi rekomendasi kesesuaian tata ruang dari Bappelitbangda.

Untuk mengatasi masalah ini, Bappelitbangda mencoba memperkuat mekanisme koordinasi melalui *Desk Integrasi Program Pembangunan Daerah*. Forum ini bertujuan mengonsolidasikan seluruh program lintas sektor sebelum diajukan ke Musrenbang Provinsi Jawa Barat. Langkah ini menunjukkan bahwa pembagian kerja mulai diarahkan menuju pola kolaboratif yang lebih terstruktur.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Namun, karena belum adanya dasar hukum yang kuat, efektivitas forum ini masih bergantung pada komitmen individu pejabat yang terlibat.

Dari perspektif teori, pembagian kerja yang efektif membutuhkan kejelasan struktur organisasi serta sistem monitoring yang kuat. Saat ini, Bappelitbangda Majalengka masih perlu memperjelas batas fungsi antarinstansi untuk menghindari redundansi program dan memastikan setiap kegiatan pembangunan sejalan dengan kebijakan ruang Aerotropolis.

#### 4) Dimensi Disiplin

Disiplin dalam koordinasi menjadi dimensi terakhir yang memastikan seluruh proses kebijakan berjalan konsisten dengan rencana yang telah disusun. Dalam konteks Bappelitbangda Majalengka, disiplin tidak hanya bermakna kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga keseriusan dalam menjaga waktu, mutu, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan penataan ruang. Berdasarkan hasil penelitian, disiplin koordinasi di lingkungan pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam implementasi. Meskipun jadwal monitoring dan evaluasi telah disusun secara periodik, tidak semua dinas hadir atau menyampaikan laporan tepat waktu.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen pengawasan internal. Dalam observasi penulis, beberapa proyek pembangunan di sekitar Kertajati masih berjalan tanpa dokumen izin pemanfaatan ruang (IPR) yang lengkap. Ketidaktegasan dalam menegakkan aturan ini memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Disiplin kelembagaan yang lemah juga berimbas pada munculnya proyek-proyek “nonprioritas” yang tidak masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), tetapi tetap berjalan karena intervensi politik atau tekanan investor.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

Namun demikian, Bappelitbangda telah menunjukkan kemajuan dengan memperkenalkan mekanisme *evaluasi berbasis indikator kinerja ruang (IKR)*. Melalui sistem ini, setiap dinas wajib melaporkan capaian indikator yang terkait dengan penataan ruang seperti luas ruang terbuka hijau, kesesuaian izin, dan pengendalian kawasan strategis. Implementasi sistem IKR dinilai mampu memperkuat kedisiplinan pelaksanaan kebijakan karena berbasis data dan dapat dipantau secara periodik.

Secara teoritis, Hasibuan (2019) menyatakan bahwa disiplin yang kuat merupakan hasil dari kepemimpinan yang konsisten, pengawasan yang ketat, dan budaya organisasi yang sehat. Dalam hal ini, Bappelitbangda masih perlu memperkuat aspek pengawasan dan sanksi agar disiplin koordinasi tidak hanya menjadi rutinitas administratif, melainkan menjadi komitmen moral dan profesional dalam menjalankan kebijakan publik.

Dari keseluruhan uraian di atas, terlihat bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Majalengka dalam kebijakan penataan ruang Aerotropolis Kertajati telah bergerak menuju arah yang lebih terstruktur meskipun belum sepenuhnya efektif. Upaya yang dilakukan telah mencakup forum lintas instansi, konsolidasi perencanaan, serta pembangunan sistem informasi spasial. Namun, efektivitas koordinasi masih terhambat oleh faktor-faktor struktural seperti perbedaan kewenangan antarlevel pemerintahan dan lemahnya komunikasi lintas sektor. Kesenjangan antara kebijakan provinsi dan kabupaten masih sering menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan strategis Kertajati.

Fenomena koordinasi ini juga memperlihatkan adanya dilema antara dorongan percepatan pembangunan dan kebutuhan penataan ruang yang berkelanjutan. Pemerintah daerah sering kali dihadapkan pada tekanan investasi dan kepentingan ekonomi jangka pendek, sementara kebijakan tata ruang menuntut kehati-hatian dalam

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial. Bappelitbangda berupaya menjadi jembatan antara dua kepentingan tersebut dengan mengedepankan prinsip integrasi pembangunan. Namun, tanpa dukungan kelembagaan dan kebijakan yang kuat di tingkat provinsi maupun pusat, upaya tersebut sulit mencapai hasil optimal. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi bukan hanya persoalan prosedural, tetapi juga menyangkut politik kebijakan dan tata kelola kekuasaan antaraktor pembangunan.

Secara empiris, hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan koordinasi tidak dapat dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia dan budaya kerja birokrasi di daerah. Masih lemahnya disiplin dan komitmen antarpemangku kepentingan dalam menjalankan rencana bersama menunjukkan bahwa pembangunan koordinatif memerlukan perubahan paradigma birokrasi dari model administratif ke arah kolaboratif. Inisiatif seperti forum konsultatif dan sistem evaluasi berbasis indikator kinerja ruang merupakan langkah positif, namun keberlanjutan sistem tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menjaga konsistensi dan transparansi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koordinasi Bappelitbangda dalam penataan ruang Aerotropolis Kertajati sedang berada pada fase transisi menuju tata kelola pembangunan yang lebih adaptif. Tantangan utama ke depan adalah memastikan adanya kesatuan arah antara pemerintah kabupaten dan provinsi, memperkuat komunikasi partisipatif dengan masyarakat, memperjelas pembagian kewenangan antarinstansi, serta menegakkan disiplin kelembagaan agar kebijakan penataan ruang benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, terukur, dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa koordinasi Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Majalengka dalam kebijakan penataan ruang Aerotropolis di Kecamatan Kertajati belum berjalan secara optimal. Berdasarkan teori Hasibuan (2019), keempat dimensi koordinasi — kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin — menunjukkan capaian yang beragam.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

Dimensi kesatuan tindakan telah diarahkan melalui penyusunan *Master Plan* Aerotropolis dan forum lintas sektor, namun perbedaan kebijakan antara provinsi dan kabupaten masih menjadi kendala utama. Komunikasi antarinstansi telah dilakukan melalui rapat koordinasi dan sistem informasi spasial, tetapi masih bersifat formal dan belum partisipatif. Pembagian kerja antardinas belum sepenuhnya jelas sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan, sementara disiplin dalam pelaksanaan kebijakan masih lemah akibat minimnya mekanisme pengawasan dan sanksi.

Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa koordinasi dalam penataan ruang Aerotropolis lebih banyak bergantung pada faktor personal dan kepemimpinan pejabat daripada pada sistem kelembagaan yang mapan. Ketika terjadi rotasi jabatan atau pergantian kepala daerah, kontinuitas koordinasi sering kali terganggu. Ini menunjukkan bahwa kelembagaan koordinasi belum terlembaga secara kuat di dalam struktur pemerintahan daerah. Di sisi lain, Bappelitbangda telah melakukan inovasi melalui penerapan sistem informasi tata ruang berbasis GIS yang dapat menjadi fondasi awal bagi koordinasi lintas sektor yang lebih efektif.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan Hasibuan bahwa koordinasi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mencakup aspek kepemimpinan, komunikasi, dan budaya organisasi. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan perlunya transformasi koordinasi pemerintah daerah dari pendekatan birokratik ke arah kolaboratif dan berbasis data spasial. Dengan demikian, pembangunan Aerotropolis Kertajati tidak hanya menjadi simbol modernisasi infrastruktur, tetapi juga laboratorium tata kelola kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu membentuk *Forum Koordinasi Penataan Ruang Aerotropolis* yang bersifat permanen dan memiliki

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

dasar hukum yang kuat agar koordinasi lintas instansi dapat berjalan berkelanjutan. Forum ini hendaknya melibatkan unsur pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, akademisi, swasta, serta masyarakat sipil agar tercipta keseimbangan kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ruang.

Kedua, Bappelitbangda perlu memperkuat sistem komunikasi dan informasi spasial melalui pengembangan *SITARMA* menjadi platform digital yang interaktif dan terbuka untuk publik. Transparansi informasi tata ruang akan meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mempercepat sinkronisasi data antarinstansi. Ketiga, pembagian kerja antarinstansi perlu dituangkan dalam dokumen *Standard Operating Procedure (SOP)* koordinasi lintas sektor yang mengatur alur kerja, tanggung jawab, dan indikator keberhasilan secara jelas.

Keempat, peningkatan disiplin kelembagaan harus diikuti dengan penerapan sistem reward and punishment yang konsisten. Instansi yang terlambat menyampaikan laporan atau melanggar ketentuan tata ruang harus dikenai sanksi administratif, sementara pihak yang berhasil melaksanakan koordinasi secara baik perlu diberikan apresiasi. Terakhir, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan pengelolaan tata ruang agar koordinasi tidak hanya bergantung pada individu tertentu, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi yang sistematis dan profesional.

Apabila seluruh rekomendasi ini dilaksanakan secara konsisten, maka koordinasi penataan ruang Aerotropolis Kertajati dapat menjadi model tata kelola pembangunan daerah yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

## **REFERENSI**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka. (2024). *Kabupaten Majalengka dalam Angka 2024*. Majalengka: BPS.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

- 
- Bappelitbangda Kabupaten Majalengka. (2023). *Laporan Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023*. Majalengka: Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
- Basri, M., & Rahardjo, D. (2021). The dynamics of intergovernmental coordination in Indonesia's regional development. *Journal of Public Administration and Policy Research*, 13(2), 56–72. <https://doi.org/10.5897/JPAPR2021.0319>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, A., & Susanto, M. (2021). Government coordination and spatial planning integration in West Java's infrastructure development. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(3), 177–192. <https://doi.org/10.23960/jakp.v8i3.2021>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2022). *Pedoman Pelaksanaan Penataan Ruang Berbasis Kawasan Strategis Nasional (KSN)*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mulyadi, D., & Prakoso, F. (2022). Strengthening regional planning coordination for sustainable development: Case study of West Java Province. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Daerah*, 6(1), 88–105. <https://doi.org/10.31227/jppd.v6i1.2022>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2020). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rachmawati, D., & Prakoso, F. (2022). Governance coordination in spatial policy of regional development. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 87–104. <https://doi.org/10.23960/jakp.v9i2.2022>
- Rahman, M. F., & Wibowo, A. (2023). Evaluating coordination challenges in Indonesia's regional spatial planning policy. *Indonesian Journal of Governance Studies*, 11(2), 95–114. <https://doi.org/10.33021/ijgs.v11i2.2023>

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

- 
- Riyadi, A., & Sutanto, H. (2023). Institutional collaboration in managing regional infrastructure projects: Lessons from West Java. *Indonesian Journal of Policy and Governance*, 7(1), 55–72. <https://doi.org/10.31227/ijpog.v7i1.2023>
- Sari, D., & Lestari, R. (2024). Collaborative spatial governance for regional transformation: Lessons from Indonesia's Aerotropolis planning. *Asian Journal of Urban and Regional Policy*, 10(1), 25–44. <https://doi.org/10.1177/ajurp.2024.10.1.25>
- Setiawan, B., & Kartasasmita, G. (2023). Building coordination capacity in Indonesia's decentralized planning system. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Daerah*, 11(3), 143–160. <https://doi.org/10.33021/jtkpd.v11i3.2023>
- Suryana, N., & Kusumawardani, D. (2024). Spatial planning innovation and aerotropolis development: The case of BIJB Kertajati. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 35(2), 101–120. <https://doi.org/10.25105/pwk.v35i2.2024>
- Taufik, R., & Nurhadi, A. (2022). Policy coordination and bureaucratic fragmentation in local governments. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 8(2), 118–134. <https://doi.org/10.31227/jkpi.v8i2.2022>
- Wibisono, H., & Nugraha, S. (2023). Public coordination and collaborative policy in spatial planning. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Daerah*, 11(3), 143–160. <https://doi.org/10.33021/jtkpd.v11i3.2023>
- Yuliana, D., & Lestari, P. (2024). Integrated spatial planning and governance coordination in aerotropolis development. *Journal of Regional Studies and Urban Policy*, 18(1), 33–51. <https://doi.org/10.1016/j.rsup.2024.01.004>